KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Jelang Nataru 2026: Komisi V: persiapkan layanan transportasi
Tanggal : Senin, 09 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jelang Nataru 2026

Komisi V: Persiapkan Layanan Transportasi

SENAYAN meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi darat, laut, dan udara untuk mempersiapkan pelayanan serta infrastruktur sejak jauh hari menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin kelancaran mobilitas sekaligus mencegah insiden yang tidak diinginkan selama libur panjang berlangsung.

Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mengatakan, kesiapan transportasi tidak boleh hanya menjadi agenda rutin yang baru diperhatikan saat mendekati hari H. Perencanaan yang matang mesti menjadi komitmen berkelanjutan bagi seluruh pihak terkait. "Standar kesiapan transportasi mesti berlaku konsisten, baik dalam menghadapi Nataru, hari besar keagamaan lainnya, maupun hari libur nasional," kata Ridwan di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Ridwan berharap, seluruh moda transportasi dapat beroperasi secara optimal tanpa kendala teknis maupun operasional. Ketika Nataru tiba, maupun hari-hari besar Islam dan hari besar nasional lainnya, tidak boleh lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ridwan mengingatkan, Pemerintah memegang tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Hal ini dikarenakan anggaran pengelolaan infrastruktur dan pelayanan transportasi bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Ia menilai, orientasi utama dari kesiapan transportasi mesti tertuju pada keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa. Pemerintah wajib memastikan masyarakat dapat beraktivitas tanpa hambatan berarti. Karena masyarakat telah membayar pajak kepada Pemerintah untuk dikelola dengan baik.

"Setelah dikelola, Pemerintah perlu memastikan bagaimana masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa ada hambatan dan korban," imbuh politisi Golkar ini.

Menurutnya, sinergi yang kuat diharapkan mampu meminimalisir risiko kecelakaan atau kemacetan parah yang kerap terjadi saat lonjakan arus penumpang. "Jangan sampai masyarakat yang sudah memenuhi kewajibannya justru menghadapi hambatan atau menjadi korban karena persiapan yang tidak maksimal," kata legislator asal Sulawesi Tenggara (Sultra) ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan mengatakan, pihaknya mulai mengintensifkan pemeriksaan kelaikan kendaraan atau *rampcheck* terhadap angkutan penumpang dan barang pada 10 November 2026. Langkah ini dilakukan untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas menjelang libur Nataru 2026/2027.

"Intensifikasi pemeriksaan menjadi salah satu strategi Pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat di tengah potensi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun 2026," ujar Aan dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).

Diketahui, Kemenhub melakukan rampcheck kendaraan mulai 10 November 2026- 3 Januari 2027. Selain kondisi teknis kendaraan, petugas juga akan memeriksa kelengkapan administrasi dan kesiapan pengemudi sebelum kendaraan diizinkan beroperasi.

Aan melanjutkan, pemeriksaan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup kondisi teknis kendaraan dan kesiapan pengemudi. Kendaraan yang dinyatakan tidak laik jalan akan dikenai tindakan sesuai ketentuan, termasuk dilarang melanjutkan perjalanan.

Sebagai informasi, berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kecelakaan pada 2025 mencapai 158.508 kejadian, naik sekitar 5 persen dibandingkan 2024 yang tercatat sebanyak 150.906 kejadian. Meski jumlah kecelakaan meningkat, angka korban meninggal dunia justru turun 9,5 persen, dari 26.839 jiwa pada 2024 menjadi 24.296 jiwa pada 2025. ■ TIF